

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur. Secara umum, sistem dan prosedur akuntansi aset tetap telah diterapkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur walaupun penerapannya belum optimal. Secara umum penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan kebutuhan

Proses perencanaan dan penganggaran sudah dilaksanakan namun belum optimal karena kurangnya koordinasi yang menyebabkan dalam merencanakan kebutuhan barang tidak sesuai kebutuhan di OPD.

2. Pengamanan dan pemeliharaan

Pelaksanaan proses Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah/Aset Kabupaten Flores Timur belum optimal karena masih terdapat permasalahan, terkait dengan pengamanan fisik yaitu barang-barang yang tidak diketahui keberadaannya

3. Pengadaan

Pelaksanaan proses pengadaan Barang Milik Daerah/Aset pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur, terutama di bidang aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, secara umum sudah dilaksanakan sesuai

dengan peraturan, karena sudah dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa melalui ULP.

4. Penggunaan

Pelaksanaan proses penetapan status penggunaan pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur, di Badan Keuangan dan Aset Daerah, sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan, sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang bersangkutan.

5. Penatausaha

Penatausaha pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah belum optimal sibebbbkan lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki, dan masi terdapat kesalahan dalam pencatatan dan status kepemilikan tanah yang belum jelas dimana hal ini terbawah dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga proses pencatatan (inventarisasi) masi terjadi kesalahan yang menyebabkan pada penyajian laporan keuangan belum akurat.

6. Pemanfaatan

Pelaksanaan proses pemanfaatan pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur, di Badan Keuangan dan Aset Daerah, sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan, sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang bersangkutan.

7. Pemeriksaan dan Pengawasan

Pemeriksaan dan pengawasan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dilakukan melalui pemantauan terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan aset yang berada dibawah penugasannya.

Selain itu juga dilakukan audit atas pengelolaan aset tetap dimana temuan BPK terhadap aset tetap yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

8. Pemusnahan

Pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan Dan Aset daerah Kabupaten Flores Timur telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

9. Penghapusan

Pelaksanaan proses Penghapusan belum optimal dilakukan karena kurangnya pengawasan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka disarankan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, yaitu mengenai sistem akuntansi dan unsur-unsur sistem pengendalian intern terhadap aset tetap:

1. Perlu dilakukan koordinasi secara rutin sehingga informasi mengenai aset selalu *Up To date*, manajemen perlu memberikan informasi tentang keberadaan aset tetap, sehingga pencatatan aset yang mendukung laporan keuangan secara lengkap dan terjamin keandalannya serta dilakukan rekonsiliasi secara berkala untuk mengidentifikasi terjadinya kesalahan dalam pencatatan mengenai aset tetap sejak dini.
2. Perlunya dilakukan analisis risiko dengan menerapkan kebijakan untuk memastikan berkurangnya risiko yang telah teridentifikasi pada penilaian resiko, di mana mencakup:

- Pembinaan sumber daya manusia
 - Pemisahaan fungsi
 - Melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting
 - Pencatatan yang akurat dan tepat waktu
3. Dalam Catatan akuntansi pihak Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur harus lebih teliti lagi dalam hal pencatatan aset tetap dalam laporan keuangan agar pencatatan akurat dan tepat waktu. Dalam aktivitas pengelolaan aset tetap daerah sebaiknya memperhatikan:
- a. Review kinerja perlu di lakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan atau kesalahan dan melakukan penelaah kinerja secara berkala.
 - b. Pengendalian fisik aset harus diberikan penomoran dan sebaiknya melakukan pencocokan terhadap laporan keuangan.
 - c. Sebaiknya setiap transaksi harus diotorisasi oleh pihak-pihak yang berwenang sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penginputan data.
 - d. Perlunya koordinasi dalam merencanakan kebutuhan barang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan.
 - e. Sebaiknya BKAD kabupaten Flores Timur lebih teliti dan melakukan koreksi setelah melakukan pencatatan dalam penatausahaan aset tetap.
 - f. Sebaiknya melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap BMD/ aset tetap yaitu dengan memberikan teguran dan sanksi

yang tegas terhadap pegawai yang tidak mengembalikan barang
ketika pindah atau pensiun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Bahtiar, Iskandar, Muchlis, 2002, *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2001, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Erlangga, Yogyakarta.
- Bastian, Indra, 2007. "*Sistem Akuntansi Sektor Publik*". Jakarta: salemba empat
- Bastian, Indra. 2011. "*Sistem Akuntansi Sektor Publik*". Jakarta: Salemba Empat
- Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019. "*opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota se-NTT*"
- Baswir Refrison, 1999, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, Edisi Ketiga, BPFE Jogjakarta.
- Christian Salanggamo (2018) *Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada pemerintah daerah kota bitung periode 2018*, Universitas Brawijaya
- Fadiah Nurwadila (2015) *Sistem Akuntansi Aset Tetap pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang*, universitas Negeri Semarang.
- Gede Muhammad, 1999, *Akuntansi Pemerintahan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta..
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mulalinda (2014) *Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro*, Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Mulyadi, 2001, *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Bagian Penelitian Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN.
- Narko, 2002, *Sistem Akuntansi*, Cetakan Ketiga, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta.
- Nida An Khafiyya (2017) *Akuntansi Asset Tetap (PSAP 07) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur*, Universitas 17 Agustus 1945
- Nina Hasanah (2017) *Analisis Sistem Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru*, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

Nordiawan, Iswahyudi, Maulidah, 2009, *Akuntansi Pemerintahan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Sandra Hasan (2017) *Sistem Akuntansi Aktiva Tetap pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatra Utara*, Universitas Sumatra Utara Medan 2017

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang “*Standar Akuntansi Pemerintahan*”

Tanjung, Abdul H, 2008, *Akuntansi Pemerintah Daerah Konsep dan Aplikasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Ulum, Ihyaul, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Umm Press, Malang.